

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an. Adz-Dzariyat (51): 56.

Al-Qur'an. Al-Baqarah (2): 30.

Al-Qur'an. Al-Imran (3): 26.

Al-Qur'an. Al-Hujurat (49): 13.

Al-Qur'an. An-Nahl (16): 90.

Al-Qur'an. An-Nisa (4): 59.

Al-Qur'an. Asy-Syura (42): 38.

Al-Qur'an. Al-Imran (3): 64

BUKU

A, Djaenuri & Enceng, M. S., *Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah.*, 2012

Amin, Fakhry., *Ilmu Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum.*, PT. Sada Kurnia Pustaka:Juli 2023

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Sekretariat Jendral Dan Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta 2006

Az, Lukman santoso, *Hukum Otonomi Desa Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera.*, Zahir Publisng:Yogyakarta, Juni 2021.

Bado, Basri Dan Zulkifli, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir, Desanta Muliavisitama*, Banten Agustus 2021

Dokumentasi Pemerintah Desa “*Cerita Sejarah Desa Kepongpongan*”

Dokumentasi Pemerintah Desa “*Sejarah Desa 2024*”

Dokumentasi Profil Desa Kepongpongan

Dzajuli, A., *Fiqh Siyasah* ., Jakarta, Kencana 2003

Dzajuli, A., “*Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*”, Jakarta: Kencana, 2009

Hasan, Muhammad Dan Muhammad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat : Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal.*, Cv. Nur Lina, Mei 2018

Khair, Otti Ilham Khair, “*Pemerintah Daerah*”, Cv. Mitra Mandiri Persada:Surabaya., Februari 2014

Kharlie., Ahmad Tholabi., *Perubahan Sistem Ketatanegaraan Pasca Amandemen Dan Implikasinya Pada Konvensi Ketatanegaraan Tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara*, Gaung Persada Februari 2020

- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*., Semesta Aksara:Yogyakarta 2019
- Mustakim, Herman Dirgantara, *Pengantar Hukum Konstitusi.*, PT. Rajagrafindo Persada, Cet-1 Rajawali Pers 2021
- N. Santika, I. G., *Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*, 2021
- Pulungan, J. Suyuthi, "*Fikih Siyasah*", Yogyakarta:Penerbit Ombak, 2014
- Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Rrepublik Indonesia, *System Pemerintahan Negara (Pendidikan Dan Pelatihan Peingkatan Perusahaan Hak Konstitusional Warga Negara)*, 2016
- Sudrajat, Hendra, "*Konsep Otonomi Daerah Dan Good Governance*", Cv. Mitra Mandiri Persada:Surabaya, Februari 2024
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif.*, Bandung:Alfabeta Cv, Agustus 2022
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Model R&D*, Bandung:Alfabeta Cv, Oktober 2013

JURNAL

- A, Alfiansyah, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, (2021): 213-214
- A, Jafar, W., Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), (2018) : 3
- A, Somad, K., Kedudukan Tap MPR RI Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (2017): 75-82
- A. Sakti R.S., Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam System Ketatanegaraan Republic Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 10 No 2 (Agustus 2021)
- Arfianto, Arif Eko Wahyudi Dan Ahmad Riyadh U. Balahmar, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa., *JKMP* (ISSN. 2338-445X), Vol. 2 No.1 Maret 2014
- Djauhari, Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam., *Jurnal Hukum*, Vol. XVI, No.1 (Maret 2016)
- Elviandri, Khuzdaifah Dimyani, dan Absori., Quo Vadis Negara Kesejahteraan:Meneguhkan Ideology Walfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Nimbar Hukum* Vol 31, No.2(Juni 2019), 254.
- F, Masriadji, Historis Kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Grondwet*, (2023) : 211-223

- Faizin, Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Pemikiran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dilihat Dari Perspektif Siyasah Syariah., *Al-Risalah* Vol.15, No.1, (Juni 2015) : 3-4
- Gusmansyah Wery, Trias Politica Dalam Perspektif Fiqh Siyasah., *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2 No. 2, (2017) : 131
- Hasim, Hasanuddin, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republic Indonesia Sebagai Suatu System, *Madani Legal Riview* Vol.1 No.2 (Desember 2017) : 121
- Huda, Muhamad Nurul, Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR., *Staatsrecht: Junral Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, Vol.2 No.1, (Juni 2022) : 150-152
- I, Feis, Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 218199, (2009).
- Kurnia, Ryzka Dwi, Konsep Ideal Imamah (Kepemimpinan) Menurut Al-Mawardi., *Politica*, Vol.6, No.1, (2019) : 77-79
- Mahmadatun, Siti, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990"., *Millah* Vol. XVI, No. 1, (Agustus 2016) : 311-312
- Natalina Nilamsari, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif, *Wacana* Volume XIII No.2, (Juni 2014) : hlm 2
- Putra, Masyrofah, Gilang Rizki Aji, Pandangan Imam Al-Mawardi Tentang Wizarah Dan Kedudukan Wazir., *Adalah: Bulletin Hukum Dan Keadilan*, Vol.6, No.3, (2022) : 48-51
- Putro, Kusnandar Marsono, Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, and Suharno, "Implementasi Sistem Otonomi Daerah Di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya," *Jurnal Bevending* 2, no. 2 (2024) : 61–67.
- Rusli, Rusandi and Muhammad, "Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif Dan Studi Kasus," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2021) :48-60.
- Samsu, La, Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah"., *Tahkim* Vol. XIII, No. 1, (suJuni 2017) : 158-159

SITUS WEB

- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, "Dokumentasi", <https://kbbi.web.id/dokumentasi> (diakses tanggal 14 November 2024, pukul 21.04 WIB)
- Kepongpongan, Desa, "Visi-Misi" <https://desakepongpongancirebon.wordpress.com/visi-misi/> (diakses pada 3 Desember, pukul 12.34 WIB)
- Putra, Teguh "Bumdes Aryakusumajati" <https://dskepongpongan.blogspot.com/> (Diakses Pada 9 Desember 2024, Pukul 18.44 WIB)

Putra, Teguh, “Bumdes Aryakusumajati”, <https://dskepongpongan.blogspot.com/> (diakses pada tanggal 7 Oktober 2024, pukul 20.00 WIB)

SKRIPSI

Burohman, Sutopo Habib, “Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Teori Legal System Di Bumkal Tuwuh Temuwuh Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2024.

Amri, Syaiful, “Diktat Fiqh Siyasah”., *Diktat*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, 2023

Izmi, Nadiatul, “Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.

Malindra, An-Nisaa’ Fitrah, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Izin Pemeriksaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Mashudin, Amas, “Implementasi Kebijakan Pp No 11 Tahun 2021 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Bumdesa Di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi*, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area Medan, 2022.

Novitasari, Lea Dita, “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (studi di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Nurwati, Wida, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanjung Medan Perspektif Fiqh Siyasah”., *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024,” *Ayan* 15, no. 1 2024.

Sisworini, Desi Fadikta, “Kedudukan Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021”., *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Yang Kemudian Dicabut

Dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Trasnigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu sri Mulyani selaku Bendahara Bumdes Aryakusumajati di
Bumdes Aryakusumajati (4 Desember, pukul 12.36 WIB)

Wawancara dengan Ibu Sri Mulyani selaku Bendahara Bumdes Aryakusumajati di
Balai Desa Kepongpongan (5 Juli 2024, pukul 09:03 WIB)

Wawancara dengan Pak Saefudin selaku Sekertaris Desa Kepongpongan di Balai
Desa Kepongpongan (5 Juni 2024, pukul 08.23 WIB)

Wawancara Dengan Pak Saefudin, Selaku Sekertaris Desa Kepongpongan Di
Balai Desa Kepongpongan (4 Desember Pukul 12.20 WIB)

Wawancara Pak Wawan Setyawan, Selaku Kepala Desa Kepongpongan Di Balai
Desa Kepongpongan (4 Desember 2024, Pukul 12.55 WIB)